



PETUNJUK TEKNIS

PENILAIAN *BASELINE*

MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI



KATA PENGANTAR

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah menetapkan target Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi. BPKP memiliki target maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) sebagai kelanjutan dari target penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang sebelumnya tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Untuk mengetahui tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan penilaian implementasi unsur dan subunsur SPIP.

Dalam perkembangannya, pemenuhan unsur dan subunsur SPIP juga perlu mengaitkan pencapaian 4 tujuan penyelenggaraan SPIP pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sehingga metodologi penilaian perlu diperbarui. Pembaruan tersebut mencakup penambahan fokus penilaian pada penetapan tujuan dan pencapaian hasil di samping menilai unsur dan subunsur SPIP, dan menghasilkan nilai yang terintegrasi yaitu skor maturitas SPIP, indeks penerapan manajemen risiko (MRI), dan indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK). Pembaruan penilaian tersebut ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).

Sebagai pedoman baru yang terbit di tengah pandemi COVID-19, pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh K/L/D sesuai Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 belum dapat dilakukan secara optimal. Untuk menetapkan data capaian SPIP Terintegrasi, perlu disusun alat ukur yang disesuaikan untuk percepatan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagai alat penilaian *baseline* pada Tahun 2021, yang dituangkan dalam sebuah petunjuk teknis.

Petunjuk teknis penilaian *baseline* ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Jakarta, 3 November 2021
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah

Raden Suhartono
NIP 19650507 198703 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan antara lain dengan implementasi manajemen risiko pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) dan Badan Usaha (BU). Kualitas implementasi manajemen risiko pada K/L/D dan BU diukur dengan indikator Manajemen Risiko Indeks (MRI).

Selain penilaian MRI, dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP yang sebelumnya menjadi target RPJMN Tahun 2015-2019, BPKP memperbarui metodologi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP. Pembaruan yang dilakukan diharapkan dapat mempertajam area perbaikan yang diperlukan dalam upaya pencapaian 4 tujuan penyelenggaraan SPIP yaitu efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk itu, penilaian terhadap kualitas perencanaan/penetapan tujuan sangat penting untuk memastikan tujuan yang dikawal dengan penyelenggaraan pengendalian intern telah memiliki sasaran, indikator, serta strategi yang tepat dalam perencanaannya. Pembaruan yang dilakukan terhadap metode penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP tetap didasarkan pada kaidah-kaidah yang ada dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Kemudian, agar penilaian atas penyelenggaraan pengendalian intern dapat menjangkau aspek pengendalian atas risiko *fraud*/korupsi, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Dengan IEPK, upaya-upaya yang dibangun oleh K/L/D dalam mengendalikan risiko *fraud*/korupsi dapat dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya secara terus menerus. Indikator tersebut juga dapat menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan K/L/D dalam upaya pengendalian atas risiko korupsi.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI, dan IEPK merupakan indikator-indikator yang memiliki tujuan yang sama, yaitu alat ukur dalam rangka perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan dan secara bersama-sama bertujuan untuk melindungi tujuan organisasi. Dalam rangka pelaksanaan penilaian atas ketiga indikator tersebut, BPKP menyusun pedoman penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Namun, kondisi pandemi COVID-19, kebijakan *refocussing* anggaran, dan pergeseran fokus prioritas pengawasan BPKP maupun pelaksanaan program dan kegiatan pada K/L/D dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, menyebabkan implementasi penilaian mandiri pada K/L/D belum dapat dilaksanakan secara optimal. Dengan latar belakang tersebut, BPKP perlu menyusun strategi agar penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dapat segera dilakukan oleh K/L/D pada Tahun 2021. Strategi yang dilakukan antara lain dengan menyediakan alat ukur penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Alat ukur penilaian *baseline* tersebut disusun berdasarkan kertas kerja yang ditetapkan dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 dengan beberapa penyesuaian penyederhanaan yang diperlukan untuk percepatan proses penilaian. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi data proyeksi nilai SPIP Terintegrasi (SPIP, MRI, dan IEPK) pada seluruh K/L/D untuk Tahun 2021.

B. Dasar Hukum Kegiatan

Dasar hukum pelaksanaan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

4. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan dilaksanakannya kegiatan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah untuk memperoleh data awal kondisi penyelenggaraan pengendalian intern pada seluruh K/L/D. Data awal tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai panduan dalam menetapkan strategi yang tepat untuk melakukan pembinaan peningkatan kualitas pengendalian intern di tahun berikutnya.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilakukan pada:

1. K/L/D yang belum melakukan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
2. K/L/D yang sudah memulai penilaian, tetapi belum dapat menyelesaikan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sampai dengan tahapan Penjaminan Kualitas pada tanggal 22 November 2021.

K/L/D target level 3 pada Tahun 2021 tidak termasuk ruang lingkup penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

E. Metode Kegiatan

Kegiatan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilakukan melalui penyebaran, pengisian, dan penyimpulan hasil pengisian kertas kerja. Pengisian kertas kerja dilakukan oleh unit kerja sampel untuk mendapatkan jawaban yang dapat mewakili K/L/D yang dilakukan penilaian.

F. Timeline Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut

No.	Tahapan	Jadwal
I	Persiapan	
1	Penyusunan kertas kerja dan petunjuk teknis	25 s.d 29 Oktober 2021
2	Diseminasi ke Perwakilan dan Kedeputian	3 November 2021
3	Identifikasi target K/L/D <i>baseline</i> dan PM/PK	4 November 2021
II	Pelaksanaan	
1	Diseminasi dari Perwakilan dan Kedeputian ke K/L/D	3 s.d 5 November 2021
2	Pengisian kertas kerja oleh K/L/D	8 s.d 19 November 2021
3	Validasi kertas kerja oleh Perwakilan dan Kedeputian	22 s.d 26 November 2021
III	Pelaporan	
1	Penyusunan dan penyampaian surat hasil penilaian kepada K/L/D	29 November s.d 7 Desember 2021
2	Penyusunan dan penyampaian surat hasil kompilasi penilaian K/L/D oleh Perwakilan dan Kedeputian	
3	Kompilasi hasil penilaian K/L/D oleh Deputi PPKD	8 s.d 17 Desember 2021

BAB II

PENILAIAN *BASELINE*

A. Perencanaan

Perencanaan kegiatan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Tim

Tim penilai *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Perwakilan BPKP dan Kedepujian disusun sesuai dengan tanggung jawab pelaksanaan penilaian pada K/L/D mitra di lingkup kerja masing-masing. Tim wajib memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Komposisi tim mempertimbangkan jenjang jabatan sesuai kebutuhan untuk melaksanakan fungsi penilaian dan fungsi reviu berjenjang.

2. Identifikasi Risiko Penugasan

Tim menyusun rencana penugasan dan melakukan identifikasi risiko kegiatan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Risiko ini meliputi kesesuaian pengambilan sampel, gangguan sarana dan prasarana, resistensi K/L/D mitra, keterlambatan progres penilaian, dan sebagainya. Risiko yang telah diidentifikasi wajib dilakukan mitigasi untuk mendorong pencapaian tujuan kegiatan penilaian.

3. Koordinasi dengan K/L/D

Tim wajib berkoordinasi dengan K/L/D mitra yang akan dilakukan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Koordinasi dilakukan dengan tujuan penyamaan persepsi atas maksud dan tujuan dilaksanakannya penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dapat dilaksanakan secara daring melalui *teleconference* maupun tatap muka di lapangan. Seluruh pelaksanaan kegiatan tersebut harus

dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Rencana Kerja

Tim menyampaikan gambaran umum kegiatan, mekanisme pelaksanaan kegiatan, serta hasil yang diharapkan dari kegiatan kepada K/L/D mitra;

2. Penyampaian Kertas Kerja

Penyampaian kertas kerja penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kepada K/L/D mitra serta pemberian penjelasan mengenai mekanisme pengisian kertas kerja. Pengisian kertas kerja dilakukan bukan atas nama individu melainkan atas nama unit kerja yang diwakili. Kertas kerja penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dapat diunduh pada tautan <http://bit.ly/BaselineSPIP>.

Kertas kerja dalam kegiatan ini dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu:

- a. Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja, yaitu kertas kerja untuk menilai penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan tingkat unit kerja untuk dikompilasikan ke dalam Kertas Kerja Tingkat K/L/D. Pengisian Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja dilakukan oleh unit kerja sampel, yaitu unit kerja penanggung jawab perencanaan, pengelola keuangan, pengelola aset, dan pengawasan intern serta tujuh unit kerja pilihan yang secara keseluruhan dapat mencakup minimal 2 sasaran strategis prioritas/utama. Untuk K/L yang memiliki unit kerja eselon I kurang dari tujuh, pengisian kertas kerja dilakukan oleh seluruh unit kerja eselon I.

Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat sebagai tim penilai tingkat K/L/D harus terlebih menentukan sampel sasaran strategis K/L/D yang akan dinilai dan mengkomunikasikannya kepada tim penilai pada tingkat unit kerja. Penentuan sasaran strategis sampel ditentukan berdasarkan fokus utama pembangunan dan karakteristik K/L/D;

- b. Kertas Kerja Tingkat K/L/D, yaitu kertas kerja untuk menilai penetapan tujuan dan pencapaian tujuan tingkat K/L/D serta mengompilasi hasil penilaian penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan tingkat unit kerja. Pengisian Kertas Kerja Tingkat K/L/D dilakukan oleh Inspektorat

- Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat dengan melibatkan unit kerja penanggung jawab perencanaan, pengelola keuangan, dan pengelola aset;
- c. Kertas Kerja Validasi Perwakilan/Kedepatian, yaitu kertas kerja yang digunakan oleh Perwakilan BPKP/Kedepatian untuk memvalidasi isian kertas kerja dari K/L/D;
 - d. Kertas Kerja Kompilasi Perwakilan/Kedepatian, yaitu kertas kerja untuk mengompilasi hasil penilaian dari Kertas Kerja Tingkat K/L/D. Pengisian Kertas Kerja Kompilasi Perwakilan BPKP/Kedepatian dilakukan oleh Perwakilan BPKP/Kedepatian.

3. Pengisian Kertas Kerja

Adapun langkah-langkah pengisian kertas kerja adalah sebagai berikut:

1) Pengisian Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja

a. Penilaian Penetapan Tujuan

Penilaian Penetapan Tujuan pada Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja dilakukan atas kualitas penetapan tujuan tingkat unit kerja untuk **tahun anggaran 2021**. Penilaian kualitas penetapan tujuan tingkat unit kerja dilakukan atas Sasaran Strategis OPD (khusus unit kerja pemerintah daerah), Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan unit kerja sampel yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis K/L/D sampel. Rincian pengisian kertas kerja diuraikan sebagai berikut:

Untuk Kementerian/Lembaga

- (1) Identifikasi Program dan Sasaran Program unit kerja sampel yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis K/L sampel beserta indikator kinerja dan targetnya. Uraikan ke dalam *sheet* PT Satker (Penetapan Tujuan Satuan Kerja). Lakukan penilaian kualitas Sasaran Program unit kerja berdasarkan ketepatan sasaran program, indikator kinerja, dan targetnya dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T);
- (2) Identifikasi Kegiatan dan Sasaran Kegiatan unit kerja sampel yang mendukung pencapaian Sasaran Program unit kerja sampel beserta indikator kinerja dan targetnya. Uraikan ke dalam *sheet* PT Satker. Lakukan penilaian kualitas Sasaran Kegiatan unit kerja

berdasarkan keterkaitannya dengan Sasaran Program unit kerja serta ketepatan sasaran kegiatan, indikator kinerja dan targetnya dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T).

Untuk Pemerintah Daerah

- (1) Identifikasi Sasaran Strategis OPD sampel yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pemda sampel beserta indikator kinerja dan targetnya. Uraikan ke dalam *sheet* PT Satker. Lakukan penilaian kualitas Sasaran Strategis OPD berdasarkan ketepatan sasaran strategis, indikator kinerja, dan targetnya dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T);
- (2) Identifikasi Program dan Sasaran Program OPD sampel yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis OPD sampel beserta indikator kinerja dan targetnya. Uraikan ke dalam *sheet* PT Satker. Lakukan penilaian kualitas Sasaran Program OPD berdasarkan keterkaitannya dengan Sasaran Strategis OPD serta ketepatan sasaran program, indikator kinerja, dan targetnya dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T);
- (3) Identifikasi Kegiatan dan Sasaran Kegiatan OPD sampel yang mendukung pencapaian Sasaran Program OPD sampel beserta indikator kinerja dan targetnya. Uraikan ke dalam *sheet* PT Satker. Lakukan penilaian kualitas Sasaran Kegiatan OPD berdasarkan keterkaitannya dengan Sasaran Program OPD serta ketepatan indikator kinerja dan targetnya dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T).

b. Penilaian Struktur dan Proses

Penilaian Struktur dan Proses pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D dilakukan dengan menilai struktur dan proses pengendalian yang dibangun unit kerja sampel untuk **tahun anggaran 2021** pada *sheet* Strupro Satker. Terdapat empat kolom penilaian struktur dan proses yang dibedakan berdasarkan empat tujuan penyelenggaraan SPIP, yaitu efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tim penilai *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Perwakilan dan

Kedeputan BPKP perlu memberikan pemahaman kepada unit kerja K/L/D terkait perbedaan substansi penilaian berdasarkan keempat tujuan penyelenggaraan SPIP tersebut. Penilaian dilakukan dengan membandingkan uraian parameter dengan kondisi yang ada pada unit kerja kemudian memilih skor 1/2/3/4/5 berdasarkan kriteria skor yang disediakan dalam *sheet* KK Strupro Satker.

c. Penilaian Pencapaian Tujuan

Penilaian Pencapaian Tujuan pada Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja dilakukan dengan menilai pencapaian tujuan efektivitas dan efisiensi tingkat unit kerja untuk **tahun anggaran 2020**. Penilaian dilakukan dengan menilai capaian *output* yaitu dengan mengidentifikasi Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis K/L/D sampel dan membandingkan target capaian Indikator Kinerja Kegiatan dengan realisasinya.

Format Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 1.1 dan 2.1**.

2) Pengisian Kertas Kerja Tingkat K/L/D

a. Penilaian Penetapan Tujuan

Penilaian Penetapan Tujuan pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D dilakukan atas kualitas penetapan tujuan tingkat K/L/D dan mengompilasi hasil penilaian kualitas penetapan tujuan tingkat unit kerja untuk **tahun anggaran 2021**. Penilaian kualitas penetapan tujuan tingkat K/L/D dilakukan atas sampel Sasaran Strategis K/L/D yaitu **minimal 2 sasaran strategis prioritas/utama** yang akan diampu oleh **maksimal tujuh unit kerja sampel**. Jika unit kerja pengampu lebih dari tujuh unit, maka diambil sampel tujuh unit kerja sesuai urutan prioritasnya. Untuk pengkompilasian hasil penilaian kualitas penetapan tujuan tingkat unit kerja dilakukan dengan menyalin hasil isian pada Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja. Rincian pengisian kertas kerja diuraikan sebagai berikut:

Untuk Kementerian/Lembaga

- (1) Identifikasi Sasaran Strategis K/L yang akan disampel dan uraikan ke dalam *sheet* KK 1.1. Lakukan penilaian kualitas Sasaran Strategis berdasarkan ketepatan sasaran strategis, indikator kinerja, dan

targetnya dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T). Selanjutnya isikan Sasaran Program unit kerja sampel yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis K/L tersebut. Isian Sasaran Program unit kerja sampel dapat diambil dari hasil isian *sheet* PT Satker pada Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja. Lakukan penilaian kualitas Sasaran Program unit kerja berdasarkan keterkaitannya dengan Sasaran Strategis K/L dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T);

- (2) Lakukan kompilasi hasil penilaian kualitas perencanaan tingkat unit kerja dengan menyalin baris hasil isian pada *sheet* PT Satker dalam Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja dari seluruh unit kerja yang disampel ke dalam *sheet* KK 1.2 pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D;
- (3) Hasil penilaian pada langkah kerja 1) dan 2) akan terkompilasi secara otomatis dan menghasilkan skor Kualitas Sasaran Strategis dan Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis pada *sheet* KKLEAD I.

Untuk Pemerintah Daerah

- (1) Identifikasi Sasaran Strategis Pemda yang akan disampel dan uraikan ke dalam *sheet* KK 1.1. Lakukan penilaian kualitas Sasaran Strategis berdasarkan ketepatan sasaran strategis, indikator kinerja, dan targetnya dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T). Selanjutnya isikan Sasaran Strategis OPD sampel yang mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pemda tersebut. Isian Sasaran Strategis OPD sampel dapat diambil dari hasil isian *sheet* PT Satker pada Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja. Lakukan penilaian kualitas Sasaran Strategis OPD berdasarkan keterkaitannya dengan Sasaran Strategis Pemda dengan memilih Ya (Y) atau Tidak (T);
- (2) Lakukan kompilasi hasil penilaian kualitas perencanaan tingkat OPD dengan menyalin baris hasil isian pada *sheet* PT Satker dalam Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja dari seluruh OPD yang disampel ke dalam *sheet* KK 1.2 pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D;
- (3) Hasil penilaian pada langkah kerja 1) dan 2) akan terkompilasi secara otomatis dan menghasilkan skor Kualitas Sasaran Strategis dan

Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis pada *sheet* KKLEAD I.

b. Penilaian Struktur dan Proses

Penilaian Struktur dan Proses pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D dilakukan dengan mengompilasi hasil penilaian struktur dan proses pengendalian yang dibangun unit kerja untuk **tahun anggaran 2021**. Untuk pengkompilasian hasil penilaian struktur dan proses unit kerja dilakukan dengan menyalin hasil isian *sheet* Strupro Satker pada Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja dari seluruh unit kerja yang disampel ke dalam *sheet* KKII_STRUPRO pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D. Hasil pengkompilasian akan terkonversi secara otomatis menjadi skor Struktur dan Proses K/L/D dalam *sheet* tersebut.

Khusus subunsur 1.7 Peran APIP yang Efektif, pengisian dilakukan berdasar hasil penilaian terakhir Kapabilitas APIP yang dicapai oleh K/L/D.

c. Penilaian Pencapaian Tujuan

Penilaian Pencapaian Tujuan pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D dilakukan dengan mengompilasi penilaian pencapaian tujuan efektivitas dan efisiensi tingkat unit kerja dan menilai pencapaian tujuan efektivitas dan efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tingkat K/L/D untuk **tahun anggaran 2020**. Rincian pengisian kertas kerja diuraikan sebagai berikut:

(1) Penilaian Pencapaian Tujuan Efektivitas dan Efisiensi

(a) Penilaian Pencapaian *Outcome*

Identifikasi Sasaran Strategis K/L/D yang akan disampel dan uraikan beserta indikator kinerja, satuan, target dan realisasinya ke dalam *sheet* KK 3.1. Penentuan sasaran strategis sampel yaitu minimal 2 sasaran strategis prioritas/utama yang akan diampu oleh maksimal tujuh unit kerja sampel dan diupayakan sama dengan sasaran strategis yang digunakan untuk penilaian Penetapan Tujuan. Dalam hal terdapat perbedaan sasaran strategis antara tahun 2020 dan 2021, maka digunakan sasaran

strategis tahun 2020 yang paling mendekati secara substansi dengan sasaran strategis sampel tahun 2021 dengan mempertimbangkan indikator kinerja yang relevan dan unit kerja pengampunya. Lakukan penilaian dengan membandingkan target dan realisasinya.

(b) Penilaian Pencapaian *Output*

Penilaian Pencapaian *Output* pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D dilakukan dengan mengompilasi hasil penilaian pencapaian *output* unit kerja sampel. Untuk pengkompilasian hasil penilaian pencapaian *output* unit kerja dilakukan dengan menyalin hasil isian *sheet* PCT Satker (Pencapaian Tujuan Satuan Kerja) pada Kertas Kerja Tingkat Unit Kerja dari seluruh unit kerja yang disampel ke dalam *sheet* KK 3.2 pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D.

(2) Penilaian Pencapaian Tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan

Penilaian Pencapaian Tujuan Keandalan Pelaporan Keuangan pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D dilakukan dengan menilai kualitas pengelolaan keuangan berdasarkan opini BPK atas Laporan Keuangan K/L/D. Penilaian dilakukan dengan memilih skor 1/2/3/4/5 berdasarkan kriteria skor yang disediakan dalam *sheet* KK 3.3.

(3) Penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan Aset Negara

Penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan Aset Negara pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D dilakukan dengan menilai kualitas pengelolaan aset berdasarkan opini BPK atas Laporan Keuangan K/L/D dan kondisi BMN di K/L/D. Penilaian dilakukan dengan memilih skor 1/2/3/4/5 berdasarkan kriteria skor yang disediakan dalam *sheet* KK 3.3.

(4) Penilaian Pencapaian Ketaatan terhadap Perundang-undangan

Penilaian Pencapaian Tujuan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada Kertas Kerja Tingkat K/L/D dilakukan dengan menilai kepatuhan K/L/D berdasarkan jumlah temuan ketidakpatuhan dalam laporan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan K/L/D. Penilaian dilakukan dengan memilih skor 1/2/3/4/5 berdasarkan kriteria skor yang disediakan dalam *sheet* KK 3.3.

- (5) Hasil penilaian pada langkah kerja 1), 2), 3), dan 4) akan terkompilasi secara otomatis pada *sheet* KKLEAD III.

Hasil penilaian Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan berdasarkan langkah-langkah kerja di atas akan terkompilasi secara otomatis pada *sheet* KKLEAD_SPIP dan menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI, dan IEPK K/L/D. Format Kertas Kerja Tingkat K/L/D selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 1.2 dan 2.2.**

4. Validasi Hasil Pengisian Kertas Kerja

Untuk memastikan kertas kerja penilaian *baseline* telah diisi dengan handal, mendekati kondisi riil pada K/L/D, dan tidak kontradiktif dengan hasil penilaian yang dilakukan pihak lain, Tim penilai *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Perwakilan dan Kedeputian BPKP perlu melakukan validasi atas hasil pengisian kertas kerja penilaian *baseline* yang telah diisi oleh K/L/D. Validasi dilakukan dengan analisis singkat dan melakukan konfirmasi kepada pihak K/L/D.

Pelaksanaan validasi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Penilaian Penetapan Tujuan divalidasi untuk yang telah memperoleh skor 3 atau lebih tinggi dengan mempertimbangkan:
 - Nilai 3 divalidasi dengan nilai SAKIP minimal level B
 - Nilai 4 divalidasi dengan nilai SAKIP minimal level BB
 - Mempertimbangkan sasaran strategis yang sudah dievaluasi pada penugasan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran
- 2) Penilaian Struktur dan Proses divalidasi untuk yang telah memperoleh skor 3 atau lebih tinggi dengan pertimbangan:
 - Hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terakhir dan perbaikan yang telah dilakukan
 - Level Kapabilitas APIP
 - Hasil penilaian *baseline* MRI Tahun 2020
 - Keterkaitan substansi jawaban dengan parameter penilaian lain dalam satu subunsur maupun dengan subunsur lain
 - Kasus hukum terkait tindak pidana korupsi

3) Penilaian Pencapaian Tujuan divalidasi untuk yang telah memperoleh skor 3 atau lebih tinggi dengan pertimbangan:

- Nilai 3 divalidasi dengan nilai SAKIP minimal level B
- Nilai 4 divalidasi dengan nilai SAKIP minimal level BB
- Opini BPK atas Laporan Keuangan K/L/D

Analisis dilakukan dengan menggunakan kertas kerja validasi sebagaimana terlampir pada **Lampiran 3**.

5. Pengisian Kertas Kerja Kompilasi Perwakilan/Kedepatian

Tim penilai *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Perwakilan BPKP dan Kedepatian melakukan kompilasi atas hasil pengisian kertas kerja penilaian *baseline* yang telah dilaksanakan oleh K/L/D mitra. Informasi yang dikompilasikan adalah nilai maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI, dan IEPK beserta komponen penilaiannya dalam posisi sebelum dan sesudah validasi. Informasi tersebut dituangkan dalam *sheet* pada Kertas Kerja Kompilasi Perwakilan/Kedepatian.

Selain mengompilasikan hasil penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Tim penilai *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Perwakilan BPKP dan Kedepatian juga mengompilasikan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan oleh K/L/D mitra. Informasi yang dikompilasikan adalah nilai maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI, dan IEPK beserta komponen penilaiannya disertai keterangan proses penilaiannya, yaitu Penjaminan Kualitas, Evaluasi Perwakilan/Kedepatian, atau Ekspos Panel. Informasi tersebut dituangkan dalam *sheet* pada Kertas Kerja Kompilasi Perwakilan/Kedepatian.

Kertas Kerja Kompilasi Perwakilan/Kedepatian selengkapnya dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

C. Pelaporan

Laporan yang dihasilkan dari kegiatan penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah laporan individu oleh Perwakilan BPKP dan Kedepatian serta laporan kompilasi oleh Perwakilan BPKP dan Kedepatian. Ketentuan penyusunan masing-masing laporan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Individu

Perwakilan BPKP dan Kedepatian menyusun laporan individu untuk masing-masing K/L/D dalam bentuk Surat Hasil Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Surat ditujukan kepada Kepala K/L/D mitra dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal/Inspektur Utama/Inspektur dan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD. Surat Hasil Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilengkapi dengan lampiran hasil penilaian sebagaimana yang dicontohkan pada **Lampiran 5**.

Perwakilan BPKP dan Kedepatian wajib mengirimkan hasil penilaian masing-masing K/L/D mitra paling lambat tanggal **7 Desember 2021**.

2. Laporan Kompilasi Perwakilan BPKP dan Kedepatian

Perwakilan BPKP dan Kedepatian menyusun laporan kompilasi atas hasil seluruh K/L/D yang menjadi mitra kerja Perwakilan BPKP dan Kedepatian. Laporan kompilasi ditujukan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD. Laporan kompilasi dilengkapi dengan lampiran hasil penilaian per masing-masing K/L/D sebagaimana yang dicontohkan pada **Lampiran 6**.

Perwakilan BPKP dan Kedepatian wajib mengirimkan hasil kompilasi paling lambat tanggal **7 Desember 2021**.

3. Laporan Kompilasi Nasional

Laporan kompilasi tingkat nasional disusun oleh Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan ditandatangani oleh Deputi BPKP Bidang PPKD. Laporan ditujukan kepada Kepala BPKP dengan tembusan kepada Sekretaris Utama BPKP dan disampaikan paling lambat tanggal **17 Desember 2021**.

BAB III

PENUTUP

Petunjuk teknis penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi berlaku untuk penilaian *baseline* pada Tahun 2021. Sesuai dengan tujuannya, bahwa hasil yang dicapai merupakan proyeksi nilai yang dapat memberikan gambaran level maturitas penyelenggaraan SPIP, MRI, dan IEPK pada seluruh K/L/D. Proyeksi tersebut dapat memberikan arah yang tepat untuk Perwakilan BPKP dan Kedeputan dalam melaksanakan pembinaan SPIP Terintegrasi kepada mitra kerja di wilayahnya sesuai dengan kelemahan yang ditemukan/*Area of Improvement*. Selain itu, hasil penilaian *baseline* juga merupakan data yang penting bagi BPKP dalam pelaporan kinerja Tahun 2021 dan pemantauan serta peningkatan kinerja ke depannya.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP selanjutnya dengan menggunakan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 secara utuh, diharapkan dapat menghasilkan penilaian yang lebih obyektif dan mengakomodir perbaikan pengendalian (*Area of Improvement/AoI*) yang telah dilakukan. Untuk itu, Perwakilan BPKP dan Kedeputan diharapkan terus membina dan memantau perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar hasil penilaian selanjutnya dapat mencapai target yang ditetapkan.

LAMPIRAN

Lampiran Petunjuk Teknis Penilaian *Baseline* Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dapat diunduh pada bit.ly/BaselineSPIP.

**PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
KEMENTERIAN / LEMBAGA XXXXX**

**KERTAS KERJA PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES
SATUAN KERJA XXX**

Indeks KK No. :
Disusun oleh/Tanggal :
Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Efektifitas dan Efisiensi	Keandalan Laporan Keuangan	Pengamanan Aset	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	KESIMPULAN NILAI	BOBOT SUBUNSUR	NILAI
			SPIP	MRI	IEPK							
1.1		Penegakan Integritas dan Nilai Etika				4.00	5.00	2.00	3.13	3.53	3.75%	0.13
1.1	1	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan keuangan Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan aset Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku	SPIP	-	-	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	5 – Pengendalian telah optimum	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	5 – Pengendalian telah optimum	4.00		
1.1	2	Kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi	SPIP	-	IEPK				3 – Cukup Memadai	3.00		
1.1	3	Organisasi menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons.	SPIP	-	IEPK				2 – Kurang Memadai	2.00		
1.1	4	Unit kerja sebagai lingkungan belajar dikelola untuk memungkinkan pegawai di semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari perilaku koruptif dan menunjukkan sikap lugas ketika berhadapan dengan situasi yang memicu perilaku korupsi	SPIP	-	IEPK				4 – Memadai	4.00		
1.1	5	Integritas organisasional yang terwujud dalam transparansi dan akuntabilitas telah tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi/unit kerja	SPIP	-	IEPK				4 – Memadai	4.00		
1.1	6	Terdapat persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional	SPIP	-	IEPK				1 – Tidak Memadai	1.00		
1.1	7	Kejadian korupsi/perilaku koruptif telah ditindaklanjuti oleh orang yang kompeten dan independen	SPIP	-	IEPK				5 – Optimum	5.00		
1.1	8	Atas hasil audit atau investigasi telah diambil langkah dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di dalam organisasi berupa pemastian penerapan sanksi dan perbaikan melalui pemulihan kerugian dan peningkatan pengendalian.	SPIP	-	IEPK				1 – Tidak Memadai	1.00		
1.2		Komitmen terhadap Kompetensi				1.00	2.00	2.00	4.00	2.25	3.75%	0.08
1.2	1	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	SPIP	-	-	1 – Hanya memiliki kebijakan	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	2.25		
1.3		Kepemimpinan yang Kondusif				3.75	3.00	2.00	1.86	2.65	3.75%	0.10
1.3	1	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	1 – Hanya memiliki kebijakan	1 – Hanya memiliki kebijakan	1 – Hanya memiliki kebijakan	1.25		
1.3	2	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	4 – Memadai	1 – Tidak Memadai	2 – Kurang Memadai	2.50		
1.3	3	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	SPIP	MRI	-	5 – Optimum	4 – Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3.75		
1.3	4	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	SPIP	MRI	-	5 – Optimum	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	1 – Tidak Memadai	3.00		

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Efektifitas dan Efisiensi	Keandalan Laporan Keuangan	Pengamanan Aset	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	KESIMPULAN NILAI	BOBOT SUBUNSUR	NILAI
			SPIP	MRI	IEPK							
1.3	5	Program antikorupsi didukung dengan penyediaan alokasi sumberdaya secara eksplisit secara memadai, baik anggaran, personil, dan sarana prasarana	SPIP	-	IEPK				3 – Cukup Memadai	3.00		
1.3	6	Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan/ mengabaikan)	SPIP	-	IEPK				2 – Kurang Memadai	2.00		
1.3	7	Pimpinan mendorong bawahan untuk mengikutinya melalui atensi yang diberikan di berbagai kesempatan, keterbukaan dan transparansi, reinforcement, perlakuan adil, dan pengambilan keputusan yang menyertakan pertimbangan etis.	SPIP	-	IEPK				1 – Tidak Memadai	1.00		
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan					2.00	5.00	3.00	2.00	3.00	3.75%	0.11
1.4	1	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keandalan laporan keuangan Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keamanan aset Dalam Struktur organisasi terdapat unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal.	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	5 – Pengendalian telah optimum	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	3.00		
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat					4.00	3.00	2.00	1.00	2.50	3.75%	0.09
1.5	1	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab memperhatikan benturan kepentingan	SPIP	-	-	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	1 – Hanya memiliki kebijakan	2.50		
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM					2.67	3.33	2.33	3.33	2.92	3.75%	0.11
1.6	1	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	SPIP	-	-	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	1 – Hanya memiliki kebijakan	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	2.50		
1.6	2	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	SPIP	MRI	-	2 – Kurang Memadai	3 – Cukup Memadai	2 – Kurang Memadai	2 – Kurang Memadai	2.25		
1.6	3	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	SPIP	MRI	-	2 – Kurang Memadai	5 – Optimum	4 – Memadai	5 – Optimum	4.00		
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif					4.00	3.00	1.00	1.00	2.25	3.75%	0.08
1.7	1	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi <i>(diisi dengan nilai Kapabilitas APIP terakhir)</i>	SPIP	-	-	4 – Institutionalized (Level 4)	3 – Delivered (Level 3)	1 – Initial (Level 1)	1 – Initial (Level 1)	2.25		
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait					2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	3.75%	0.09
1.8	1	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
1.8	2	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3.00					
2.1	Identifikasi Risiko					3.00	2.67	3.00	2.33	2.75	10.00%	0.28
2.1	1	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko.	SPIP	MRI	-	4 – Memadai	2 – Kurang Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3.00		
2.1	2	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	5 – Optimum	1 – Tidak Memadai	3.00		
2.1	3	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah	SPIP	MRI	-	2 – Kurang Memadai	3 – Cukup Memadai	1 – Tidak Memadai	3 – Cukup Memadai	2.25		
2.2	Analisis Risiko					3.20	3.00	3.20	3.33	3.18	10.00%	0.32
2.2	1	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3.00					
2.2	2	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	SPIP	MRI	-	4 – Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	5 – Optimum	3.75		
2.2	3	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	4 – Memadai	3 – Cukup Memadai	3.25		

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Efektifitas dan Efisiensi	Keandalan Laporan Keuangan	Pengamanan Aset	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	KESIMPULAN NILAI	BOBOT SUBUNSUR	NILAI
			SPIP	MRI	IEPK							
2.2	4	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	SPIP	MRI	-	1 – Tidak Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	5 – Optimum	3.00		
2.2	5	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	SPIP	MRI	-	5 – Optimum	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	1 – Tidak Memadai	3.00		
2.2	6	Analisis dan asesmen risiko telah dilakukan dan menghasilkan rancangan tindak pengendalian untuk memitigasi risiko korupsi yang sudah terpetakan	SPIP	-	IEPK				3 – Cukup Memadai	3.00		
3.1	Reviu atas Kinerja					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05
3.1	1	Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
3.2	Pembinaan SDM					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05
3.2	1	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05
3.3	1	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset					2.00	3.00	2.00	2.00	2.25	2.27%	0.05
3.4	1	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi.	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.25		
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05
3.5	1	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi.	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
3.6	Pemisahan Fungsi					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05
3.6	1	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05
3.7	1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05
3.8	1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatannya					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05
3.9	1	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatannya	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatannya					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05
3.10	1	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05
3.11	1	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
4.1	Informasi yang Relevan					3.25	3.25	2.75	2.60	2.96	5.00%	0.15
4.1	1	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal.	SPIP	-	-	4 – Memadai	3 – Cukup Memadai	2 – Kurang Memadai	3 – Cukup Memadai	3.00		
4.1	2	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	4 – Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3.25		
4.1	3	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	1 – Tidak Memadai	2.50		
4.1	4	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3.00					

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Efektifitas dan Efisiensi	Keandalan Laporan Keuangan	Pengamanan Aset	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	KESIMPULAN NILAI	BOBOT SUBUNSUR	NILAI
			SPIP	MRI	IEPK							
4.1	5	Saluran pelaporan internal dikelola secara kredibel dalam menerima pelaporan dan memberikan perlindungan kepada pelapor sehingga kepedulian meningkat dan memberikan efek penggentar yang efektif.	SPIP	-	IEPK				3 – Cukup Memadai	3.00		
4.2	Komunikasi yang Efektif					1.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00%	0.15
4.2	1	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	SPIP	-	-	1 – Tidak Memadai	3 – Cukup Memadai	5 – Optimum	3 – Cukup Memadai	3.00		
5.1	Pemantauan Berkelanjutan					3.33	4.00	3.67	2.00	3.25	7.50%	0.24
5.1	1	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.	SPIP	-	-	4 – Memadai	4 – Memadai	5 – Optimum	1 – Tidak Memadai	3.50		
5.1	2	Proses manajemen risiko telah direviu	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	5 – Optimum	3 – Cukup Memadai	4 – Memadai	3.75		
5.1	3	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	1 – Tidak Memadai	2.50		
5.2	Evaluasi Terpisah					3.00	3.00	3.50	3.00	3.13	7.50%	0.23
5.2	1	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	SPIP	-	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3.00		
5.2	2	Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	4 – Memadai	3 – Cukup Memadai	3.25		

Skor Struktur dan Proses

2.6853

**PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
KEMENTERIAN / LEMBAGA XXXXX**

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5	50.00%		2.50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	50.00%		2.50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN		100.00%		5.00		
BOBOT PERENCANAAN			40.00%		2.000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.000	3.75%		0.11		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3.000	3.75%		0.11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3.000	3.75%		0.11		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.000	3.75%		0.11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3.000	3.75%		0.11		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3.000	3.75%		0.11		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3.000	3.75%		0.11		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3.000	3.75%		0.11		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	3.000	10%		0.30		
Analisis Risiko (2.2)	3.000	10%		0.30		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3.000	2.27%		0.07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3.000	2.27%		0.07		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	3.000	2.27%		0.07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3.000	2.27%		0.07		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	3.000	2.27%		0.07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3.000	2.27%		0.07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	3.000	2.27%		0.07		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3.000	2.27%		0.07		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	3.000	2.27%		0.07		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	3.000	2.27%		0.07		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3.000	2.27%		0.07		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	3.000	5%		0.15		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3.000	5%		0.15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	3.000	7.50%		0.23		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3.000	7.50%		0.23		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				3.000		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30.00%		0.900	

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	4	15%		0.60		
Capaian <i>Output</i>	4	15%		0.60		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25%		0.75		
Pengamanan atas Aset						
Keamanan Administrasi	1	10%		0.10		
Keamanan Fisik	5	5%		0.25		
Keamanan Hukum	2	10%		0.20		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	4	20%		0.80		
SUB JUMLAH HASIL		100.00%		3.30		
BOBOT HASIL			30.00%		0.99	
NILAI BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						3.890
NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO HASIL BASELINE SPIP						3.91
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI			
PERENCANAAN	40.00%		2.00			
KUALITAS PERENCANAAN	40.00%	5.00	2.00			
KAPABILITAS	30.00%		0.90			
KEPEMIMPINAN	5.00%	3.00	0.15			
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5.00%	3.00	0.15			
SUMBER DAYA MANUSIA	5.00%	3.00	0.15			
KEMITRAAN	2.50%	3.00	0.08			
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12.50%	3.00	0.38			
HASIL	30.00%		1.01			
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18.75%	3.00	0.56			
OUTCOMES	11.25%	4	0.45			
TOTAL	100.00%		3.91			
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)						3.00
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI			
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		1.44			
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9.60%	3.00	0.29			
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7.20%	3.00	0.22			
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7.20%	3.00	0.22			
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14.40%	3.00	0.43			
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9.60%	3.00	0.29			
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%		1.08			
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9.00%	3.00	0.27			
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3.60%	3.00	0.11			
KEPEMIMPINAN ETIS	9.00%	3.00	0.27			
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7.20%	3.00	0.22			
IKLIM ETIS PRINSIP	7.20%	3.00	0.22			
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%		0.48			
INVESTIGASI	8.00%	3.00	0.24			
TINDAKAN KOREKTIF	8.00%	3.00	0.24			
TOTAL	100%		3.00			

**PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
KEMENTERIAN / LEMBAGA XXXXX**

KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN
KK LEAD I - PENETAPAN TUJUAN

Indeks KK No. :
Disusun oleh/Tanggal :
Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

A. Kualitas Sasaran Strategis

No	Uraian	Uraian pengukuran	Bobot	Skor	Skor Akhir
1	Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga				
a	Sasaran Strategis Tepat	Sasaran Strategis berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis	40	100.00%	40.00%
b	Indikator Kinerja Tepat dan Baik	Indikator kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil	30	100.00%	30.00%
c	Target Kinerja Baik	Target kinerja yang baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target di atasnya	30	100.00%	30.00%
	Skor Akhir				100.00%
	Level				A

B. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

No	Uraian	Uraian pengukuran	Bobot	Skor	Skor Akhir
1	Kualitas Program		100		100.00%
a	Keterkaitan dengan Sasaran Strategis	Mengukur <i>cascading</i> kinerja dari sasaran strategis K/L ke sasaran program Unit kerja	30	100.00%	30.00%
b	Kualitas sasaran program	Sasaran Program berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis	30	100.00%	30.00%
c	Kualitas indikator kinerja program	Indikator kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil	20	100.00%	20.00%
d	Kualitas target kinerja program	Target kinerja yang baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target di atasnya	20	100.00%	20.00%
2	Kualitas Kegiatan		100		85.00%
a	Keterkaitan dengan sasaran program		30	100.00%	30.00%
b	Kualitas sasaran kegiatan		30	50.00%	15.00%
c	Kualitas indikator kinerja kegiatan		20	100.00%	20.00%
d	Kualitas target kinerja kegiatan		20	100.00%	20.00%
	Skor Akhir				92.50%
	Level				A

Gradasi Level

- 1 sampai dengan 60%
- 2 lebih besar dari 60% s.d. 70%
- 3 lebih besar dari 70% s.d. 80%
- 4 lebih besar dari 80% s.d. 90%
- 5 lebih besar dari 90%

**PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
KEMENTERIAN / LEMBAGA XXXXX**

KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN KK 1.2 - PENILAIAN KUALITAS SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH										Indeks KK No. :		Disusun oleh/Tanggal :		Direviu oleh/Tanggal :		Disetujui oleh/Tanggal :	
NO	SASARAN STRATEGIS				KUALITAS SASARAN STRATEGIS			SASARAN PROGRAM SATUAN KERJA SAMPEL					KETERKAITAN SASARAN PROGRAM DENGAN SASARAN STRATEGIS K/L				
	KODE SASARAN	URAIAN SASARAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	SASARAN STRATEGIS TEPAT	IK TEPAT DAN BAIK	TARGET KINERJA BAIK	KODE SASARAN PROGRAM	NAMA SATKER	URAIAN SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA					
1	SS1	Sastra 1	IK Sastra 1	...	Y	Y	Y	SS1.1	Satker XX-1	Saspro Satker 1.1	IK Saspro 1.1	...	Y				
								SS1.2	Satker XX-2	Saspro Satker 1.2	IK Saspro 1.2		Y				
2					
3					
		<i>Insert row di atas ini</i>															
Jumlah Y					1	1	1						2				
Jumlah Populasi					1	1	1						2				
Persentase					100.00%	100.00%	100.00%						100.00%				

**PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
KEMENTERIAN / LEMBAGA XXXXX**

KERTAS KERJA II - PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES

Indeks KK No. :
Disusun oleh/Tanggal :
Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			SATKER 1	SATKER 2	SATKER 3	SATKER 4	SATKER 5	SATKER 6	SATKER 7	SATKER 8	SATKER 9	SATKER 10	SATKER 11	NILAI K/L/D	BOBOT SUBUNSUR	NILAI
			SPIP	MRI	IEPK														
1.1		Penegakan Integritas dan Nilai Etika				3.00											3.00	3.75%	0.11
1.1	1	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	SPIP	-	-														
		Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan keuangan				3.00											3.00		
		Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan aset																	
		Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku																	
1.1	2	Kebijakan ekspisit atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.1	3	Organisasi menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons.	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.1	4	Unit kerja sebagai lingkungan belajar dikelola untuk memungkinkan pegawai di semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari perilaku korupif dan menunjukkan sikap lugas ketika berhadapan dengan situasi yang memicu perilaku korupsi	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.1	5	Integritas organisasional yang terwujud dalam transparansi dan akuntabilitas telah tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi/unit kerja	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.1	6	Terdapat persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.1	7	Kejadian korupsi/perilaku korupif telah ditindaklanjuti oleh orang yang kompeten dan independen	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.1	8	Atas hasil audit atau investigasi telah diambil langkah dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di dalam organisasi berupa pemastian penenaan sanksi dan perbaikan melalui pemulihan kerugian dan peningkatan pengendalian.	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.2		Komitmen terhadap Kompetensi				3.00											3.00	3.75%	0.11
1.2	1	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	SPIP	-	-	3.00											3.00		
1.3		Kepemimpinan yang Kondusif				3.00											3.00	3.75%	0.11
1.3	1	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	3.00											3.00		
1.3	2	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
1.3	3	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
1.3	4	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
1.3	5	Program antikorupsi didukung dengan penyediaan alokasi sumberdaya secara eksplisit secara memadai, baik anggaran, personil, dan sarana prasarana	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.3	6	Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan/ mengabaikan)	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.3	7	Pimpinan mendorong bawahan untuk mengikutinya melalui atensi yang diberikan di berbagai kesempatan, keterbukaan dan transparansi, reinforcement, perlakuan adil, dan pengambilan keputusan yang menyertakan pertimbangan etis.	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.4		Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan				3.00											3.00	3.75%	0.11

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			SATKER 1	SATKER 2	SATKER 3	SATKER 4	SATKER 5	SATKER 6	SATKER 7	SATKER 8	SATKER 9	SATKER 10	SATKER 11	NILAI K/L/D	BOBOT SUBUNSUR	NILAI
			SPIP	MRI	IEPK														
1.4	1	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keandalan laporan keuangan Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keamanan aset Dalam Struktur organisasi terdapat unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal.	SPIP	-	-	3.00											3.00		
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat																3.00	3.75%	0.11
1.5	1	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab memperhatikan benturan kepentingan	SPIP	-	-	3.00											3.00		
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM																3.00	3.75%	0.11
1.6	1	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	SPIP	-	-	3.00											3.00		
1.6	2	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
1.6	3	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif																3.00	3.75%	0.11
1.7	1	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi <i>(diisi dengan nilai Kapabilitas APIP terakhir)</i>	SPIP	-	-	3.00											3.00		
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait																3.00	3.75%	0.11
1.8	1	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	3.00											3.00		
1.8	2	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
2.1	Identifikasi Risiko																3.00	10.00%	0.30
2.1	1	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko.	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
2.1	2	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
2.1	3	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
2.2	Analisis Risiko																3.00	10.00%	0.30
2.2	1	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
2.2	2	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
2.2	3	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
2.2	4	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
2.2	5	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
2.2	6	Analisis dan asesmen risiko telah dilakukan dan menghasilkan rancangan tindak pengendalian untuk memitigasi risiko korupsi yang sudah terpetakan	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
3.1	Reviu atas Kinerja																3.00	2.27%	0.07
3.1	1	Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	3.00											3.00		
3.2	Pembinaan SDM																3.00	2.27%	0.07
3.2	1	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	SPIP	-	-	3.00											3.00		
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi																3.00	2.27%	0.07
3.3	1	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	SPIP	-	-	3.00											3.00		
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset																3.00	2.27%	0.07
3.4	1	Pengelolaan BMND dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi.	SPIP	-	-	3.00											3.00		
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja																3.00	2.27%	0.07
3.5	1	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi	SPIP	-	-	3.00											3.00		
3.6	Pemisahan Fungsi																3.00	2.27%	0.07

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			SATKER 1	SATKER 2	SATKER 3	SATKER 4	SATKER 5	SATKER 6	SATKER 7	SATKER 8	SATKER 9	SATKER 10	SATKER 11	NILAI K/L/D	BOBOT SUBUNSUR	NILAI
			SPIP	MRI	IEPK														
3.6	1	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	SPIP	-	-	3.00											3.00		
3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting																	3.00		
3.7	1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	SPIP	-	-	3.00											3.00	2.27%	0.07
3.8 Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian																	3.00		
3.8	1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	SPIP	-	-	3.00											3.00	2.27%	0.07
3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatannya																	3.00		
3.9	1	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatannya	SPIP	-	-	3.00											3.00	2.27%	0.07
3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatannya																	3.00		
3.10	1	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	SPIP	-	-	3.00											3.00	2.27%	0.07
3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting																	3.00		
3.11	1	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	SPIP	-	-	3.00											3.00	2.27%	0.07
4.1 Informasi yang Relevan																	3.00		
4.1	1	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal.	SPIP	-	-	3.00											3.00	5.00%	0.15
4.1	2	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengadaan	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
4.1	3	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
4.1	4	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
4.1	5	Saluran pelaporan internal dikelola secara kredibel dalam menerima pelaporan dan memberikan perlindungan kepada pelapor sehingga kepedulian meningkat dan memberikan efek pengantar yang efektif.	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
4.2 Komunikasi yang Efektif																	3.00		
4.2	1	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	SPIP	-	-	3.00											3.00	5.00%	0.15
5.1 Pemantauan Berkelanjutan																	3.00		
5.1	1	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.	SPIP	-	-	3.00											3.00	7.50%	0.23
5.1	2	Proses manajemen risiko telah direviu	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
5.1	3	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
5.2 Evaluasi Terpisah																	3.00		
5.2	1	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	SPIP	-	-	3.00											3.00	7.50%	0.23
5.2	2	Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		

Skor Struktur dan Proses

3.0000

**PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH XXXXX**

KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
KK LEAD III - PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP

Indeks KK No. :
Disusun oleh/Tanggal :
Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

No.	Pencapaian Tujuan			Capaian K/L/D
	Indikator	Definisi Indikator	Cara Pengukuran	
A	Efektivitas dan Efisiensi			
1.	Capaian Outcome	Mengukur efektivitas pencapaian tujuan organisasi	Menghitung rata-rata pencapaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis K/L/D	4
2.	Capaian Output	Mengukur efisiensi pencapaian tujuan kegiatan	Menghitung rata-rata pencapaian indikator output dari kegiatan satuan kerja	4
B	Keandalan Pelaporan Keuangan			
	Opini atas Laporan Keuangan – BPK RI	Penilaian atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah oleh BPK RI	Dapatkan informasi Opini Laporan Keuangan dalam 5 tahun terakhir, yang terdiri dari: - TMP - TW - WDP - WTP-DPP - WTP	3
C	Pengamanan atas Aset Negara/Daerah			
1.	Keamanan Administrasi	Penilaian kualitas penatausahaan BMN/BMD dalam rangka mengamankan BMN/BMD dari sisi administrasi	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan administrasi aset dalam 5 tahun terakhir	1
2.	Keamanan Hukum	Penilaian atas upaya menjaga/melindungi BMN/ BMD dari persengketaan, gugatan, dan beralihnya kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan hukum aset dalam 5 tahun terakhir	5
3.	Keamanan Fisik	Penilaian atas upaya mengatasi penurunan fungsi, jumlah, serta hilangnya barang	Menghitung persentase BMN/BMD dalam kondisi berfungsi baik dan aman dalam 5 tahun terakhir	2
D	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
1.	Jumlah Temuan atas Ketidakpatuhan dalam LHP BPK RI	Banyaknya temuan yang dilaporkan dalam LHP BPK RI pada subbab Temuan atas Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.	Menghitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.	4

**PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
KEMENTERIAN / LEMBAGA XXXXX**

KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
KK 3.2 - PENILAIAN CAPAIAN OUTPUT

Indeks KK No. :
Disusun oleh/Tanggal :
Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

NAMA SATKER	NO	URAIAN SASARAN PROGRAM	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN			
					SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI
Satker XXX	1	Program A	Kegiatan A.1	IK Kegiatan A.1.1	Persen	100	70	70.00%
				IK Kegiatan A.1.2	Juta Rupiah	100	72	72.00%
			Kegiatan A.2	IK Kegiatan A.2.1	Unit	100	70	70.00%
	IK Kegiatan A.2.2	...		100	70	70.00%		
	2	Program B		Kegiatan B.1	IK Kegiatan B.1.1		100	70
			IK Kegiatan B.1.2			100	70	70.00%
							100	70
		<i>Insert row di atas ini</i>						
				Capaian Rata-rata				70.29%
				GRADE				B

**PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
KEMENTERIAN / LEMBAGA XXXXX**

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
KK 3.3 - Keandalan Laporan Keuangan, Keamanan Aset, dan Ketaatan**

Indeks KK No. :
Disusun oleh/Tanggal :
Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

RESULTS				KRITERIA SKOR					SIMPULAN SKOR
NO	INDIKATOR	DEFINISI INDIKATOR	CARA PENGUKURAN	5	4	3	2	1	
Keandalan Pelaporan Keuangan									
1.	Opini atas Laporan Keuangan – BPK RI	Penilaian atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah oleh BPK RI	Dapatkan informasi Opini Laporan Keuangan dalam 5 tahun terakhir, yang terdiri dari: - TMP - TW - WDP - WTP-DPP - WTP	Wajar Tanpa Pengecualian 5 kali berturut-turut atau lebih dan tidak ada temuan berulang	Wajar Tanpa Pengecualian 3 sampai 4 kali berturut-turut dan tidak ada temuan berulang	Wajar Tanpa Pengecualian 1 sampai 2 kali berturut-turut dan masih ada temuan berulang	Wajar Dengan Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (pada capaian terakhir)	Tidak Memberikan Pendapat atau Tidak Wajar (pada capaian terakhir)	3
Pengamanan atas Aset Negara/Daerah									
1.	Keamanan Administrasi	Penilaian kualitas penatausahaan BMN/BMD dalam rangka mengamankan BMN/BMD dari sisi administrasi	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan administrasi aset dalam 5 tahun terakhir	Opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal 5 kali berturut-turut dan tidak terdapat catatan sama sekali terkait aset	Opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal 3 kali berturut-turut dan tidak terdapat catatan sama sekali terkait aset	Opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal 1 kali, dimungkinkan masih terdapat catatan terkait aset	Opini Wajar Dengan Pengecualian dan/atau terdapat catatan terkait aset	Opini Tidak Memberikan Pendapat atau Tidak Wajar dan/atau terdapat catatan terkait aset	1
2.	Keamanan Hukum	Penilaian atas upaya menjaga/melindungi BMN/BMD dari persengketaan, gugatan, dan beralihnya kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan hukum aset dalam 5 tahun terakhir	Selama 5 tahun tidak terdapat aset yang bermasalah hukum dalam catatan LHP BPK	Selama 3 tahun tidak terdapat aset yang bermasalah hukum dalam catatan LHP BPK	Selama 2 tahun tidak terdapat aset yang bermasalah hukum dalam catatan LHP BPK	Masih terdapat aset yang bermasalah hukum dalam catatan LHP BPK namun tidak mempengaruhi opini BPK	Masih terdapat aset yang bermasalah hukum dalam catatan LHP BPK yang mempengaruhi opini BPK	5
3.	Keamanan Fisik	Penilaian atas upaya mengatasi penurunan fungsi, jumlah, serta hilangnya barang	Menghitung persentase BMN/BMD dalam kondisi berfungsi baik dan aman dalam 5 tahun terakhir	Selama minimal 5 tahun 100% BMN/BMD berfungsi baik dan aman	Selama 3 tahun 100% BMN/BMD berfungsi baik dan aman	100% BMN/BMD berfungsi baik dan aman	75-99% BMN/D berfungsi baik dan aman	<75% BMN/D berfungsi baik dan aman	2
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan									
1	Jumlah Temuan atas Ketidakpatuhan dalam LHP BPK RI	Banyaknya temuan yang dilaporkan dalam LHP BPK RI pada subbab Temuan atas Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.	Menghitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait Ketidakpatuhan terhadap Peraturan PerUUan	Dalam 4 tahun berturut-turut jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK tidak lebih dari lima dan tidak memengaruhi opini BPK	Dalam 3 tahun berturut-turut jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK tidak lebih dari lima dan tidak memengaruhi opini BPK	Dalam 2 tahun berturut-turut jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK tidak lebih dari lima dan tidak memengaruhi opini BPK	Dalam tahun anggaran terakhir sebelum penilaian jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK tidak lebih dari lima dan tidak memengaruhi opini BPK	Dalam tahun anggaran terakhir sebelum penilaian jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK lebih dari lima	4

**PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
KEMENTERIAN / LEMBAGA / PEMERINTAH DAERAH XXXXX**

KERTAS KERJA PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES
SATUAN KERJA XXX

Indeks KK No. :
Disusun oleh/Tanggal :
Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Efektifitas dan Efisiensi	Keandalan Laporan Keuangan	Pengamanan Aset	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	KESIMPULAN NILAI	BOBOT SUBUNSUR	NILAI
			SPIP	MRI	IEPK							
		Penegakan Integritas dan Nilai Etika				3.00	5.00	2.00	2.88	3.22	3.75%	0.12
1.1	1	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan keuangan Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan aset Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku	SPIP	-	-	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	5 – Pengendalian telah optimum	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	1 – Hanya memiliki kebijakan	2.75		
1.1	2	Kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi	SPIP	-	IEPK				5 – Optimum	5.00		
1.1	3	Organisasi menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons.	SPIP	-	IEPK				2 – Kurang Memadai	2.00		
1.1	4	Unit kerja sebagai lingkungan belajar dikelola untuk memungkinkan pegawai di semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari perilaku koruptif dan menunjukkan sikap lugas ketika berhadapan dengan situasi yang memicu perilaku korupsi	SPIP	-	IEPK				4 – Memadai	4.00		
1.1	5	Integritas organisasional yang terwujud dalam transparansi dan akuntabilitas telah tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi/unit kerja	SPIP	-	IEPK				4 – Memadai	4.00		
1.1	6	Terdapat persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional	SPIP	-	IEPK				1 – Tidak Memadai	1.00		
1.1	7	Kejadian korupsi/perilaku koruptif telah ditindaklanjuti oleh orang yang kompeten dan independen	SPIP	-	IEPK				5 – Optimum	5.00		
1.1	8	Atas hasil audit atau investigasi telah diambil langkah dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di dalam organisasi berupa pemastian peneanan sanksi dan perbaikan melalui pemulihan kerugian dan peningkatan pengendalian.	SPIP	-	IEPK				1 – Tidak Memadai	1.00		
1.2		Komitmen terhadap Kompetensi				1.00	2.00	2.00	4.00	2.25	3.75%	0.08
1.2	1	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	SPIP	-	-	1 – Hanya memiliki kebijakan	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	2.25		
1.3		Kepemimpinan yang Kondusif				3.75	3.00	2.00	1.86	2.65	3.75%	0.10
1.3	1	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	1 – Hanya memiliki kebijakan	1 – Hanya memiliki kebijakan	1 – Hanya memiliki kebijakan	1.25		
1.3	2	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	4 – Memadai	1 – Tidak Memadai	2 – Kurang Memadai	2.50		
1.3	3	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	SPIP	MRI	-	5 – Optimum	4 – Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3.75		
1.3	4	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	SPIP	MRI	-	5 – Optimum	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	1 – Tidak Memadai	3.00		
1.3	5	Program antikorupsi didukung dengan penyediaan alokasi sumberdaya secara eksplisit secara memadai, baik anggaran, personil, dan sarana	SPIP	-	IEPK				3 – Cukup Memadai	3.00		
1.3	6	Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan/ mengabaikan)	SPIP	-	IEPK				2 – Kurang Memadai	2.00		

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Efektifitas dan Efisiensi	Keandalan Laporan Keuangan	Pengamanan Aset	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	KESIMPULAN NILAI	BOBOT SUBUNSUR	NILAI
			SPIP	MRI	IEPK							
1.3	7	Pimpinan mendorong bawahan untuk mengikutinya melalui atensi yang diberikan di berbagai kesempatan, keterbukaan dan transparansi, reinforcement, perlakuan adil, dan pengambilan keputusan yang menyertakan pertimbangan etis.	SPIP	-	IEPK				1 – Tidak Memadai	1.00		
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan					2.00	5.00	3.00	2.00	3.00	3.75%	0.11
1.4	1	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keandalan laporan keuangan Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keamanan aset Dalam Struktur organisasi terdapat unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal.	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	5 – Pengendalian telah optimum	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	3.00		
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat					4.00	3.00	2.00	1.00	2.50	3.75%	0.09
1.5	1	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab memperhatikan benturan kepentingan	SPIP	-	-	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	1 – Hanya memiliki kebijakan	2.50		
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM					2.67	3.33	2.33	3.33	2.92	3.75%	0.11
1.6	1	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	SPIP	-	-	4 – Efektivitas kebijakan sudah dievaluasi	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	1 – Hanya memiliki kebijakan	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	2.50		
1.6	2	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	SPIP	MRI	-	2 – Kurang Memadai	3 – Cukup Memadai	2 – Kurang Memadai	2 – Kurang Memadai	2.25		
1.6	3	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	SPIP	MRI	-	2 – Kurang Memadai	5 – Optimum	4 – Memadai	5 – Optimum	4.00		
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif					1.00	3.00	2.00	4.00	2.50	3.75%	0.09
1.7	1	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi <i>(diisi dengan nilai Kapabilitas APIP terakhir)</i>	SPIP	-	-	1 – Initial (Level 1)	3 – Delivered (Level 3)	2 – Structured (Level 2)	4 – Institutionalized (Level 4)	2.50		
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait					2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	3.75%	0.09
1.8	1	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
1.8	2	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3.00					
2.1	Identifikasi Risiko					3.00	2.67	3.00	2.33	2.75	10.00%	0.28
2.1	1	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko.	SPIP	MRI	-	4 – Memadai	2 – Kurang Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3.00		
2.1	2	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	5 – Optimum	1 – Tidak Memadai	3.00		
2.1	3	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah	SPIP	MRI	-	2 – Kurang Memadai	3 – Cukup Memadai	1 – Tidak Memadai	3 – Cukup Memadai	2.25		
2.2	Analisis Risiko					3.20	3.00	3.20	3.33	3.18	10.00%	0.32
2.2	1	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3.00					
2.2	2	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	SPIP	MRI	-	4 – Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	5 – Optimum	3.75		
2.2	3	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	4 – Memadai	3 – Cukup Memadai	3.25		
2.2	4	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	SPIP	MRI	-	1 – Tidak Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	5 – Optimum	3.00		
2.2	5	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	SPIP	MRI	-	5 – Optimum	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	1 – Tidak Memadai	3.00		
2.2	6	Analisis dan asesmen risiko telah dilakukan dan menghasilkan rancangan tindak pengendalian untuk memitigasi risiko korupsi yang sudah terpetakan	SPIP	-	IEPK				3 – Cukup Memadai	3.00		
3.1	Reviu atas Kinerja					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Efektifitas dan Efisiensi	Keandalan Laporan Keuangan	Pengamanan Aset	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	KESIMPULAN NILAI	BOBOT SUBUNSUR	NILAI
			SPIP	MRI	IEPK							
3.1	1	Pimpinan organisasi membandingkan tolak ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
3.2	Pembinaan SDM					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05
3.2	1	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05
3.3	1	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset					2.00	3.00	2.00	2.00	2.25	2.27%	0.05
3.4	1	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi.	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	3 – Kebijakan sudah diimplementasikan	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.25		
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05
3.5	1	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi.	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
3.6	Pemisahan Fungsi					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05
3.6	1	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
3.7	Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05
3.7	1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
3.8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05
3.8	1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
3.9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05
3.9	1	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
3.10	Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05
3.10	1	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
3.11	Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting					2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.27%	0.05
3.11	1	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	SPIP	-	-	2 – Kebijakan dikomunikasikan dan dipahami	2.00					
4.1	Informasi yang Relevan					3.25	3.00	3.75	2.60	3.15	5.00%	0.16
4.1	1	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal.	SPIP	-	-	4 – Memadai	2 – Kurang Memadai	4 – Memadai	3 – Cukup Memadai	3.25		
4.1	2	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	4 – Memadai	5 – Optimum	3 – Cukup Memadai	3.75		
4.1	3	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	1 – Tidak Memadai	2.50		
4.1	4	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3.00					
4.1	5	Saluran pelaporan internal dikelola secara kredibel dalam menerima pelaporan dan memberikan perlindungan kepada pelapor sehingga kepedulian meningkat dan memberikan efek penggentar yang efektif.	SPIP	-	IEPK				3 – Cukup Memadai	3.00		
4.2	Komunikasi yang Efektif					3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00%	0.15
4.2	1	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	SPIP	-	-	3 – Cukup Memadai	3.00					
5.1	Pemantauan Berkelanjutan					3.67	4.00	3.00	2.33	3.25	7.50%	0.24

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			Efektifitas dan Efisiensi	Keandalan Laporan Keuangan	Pengamanan Aset	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	KESIMPULAN NILAI	BOBOT SUBUNSUR	NILAI
			SPIP	MRI	IEPK							
5.1	1	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.	SPIP	-	-	5 – Optimum	4 – Memadai	3 – Cukup Memadai	2 – Kurang Memadai	3.50		
5.1	2	Proses manajemen risiko telah direviu	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	5 – Optimum	3 – Cukup Memadai	4 – Memadai	3.75		
5.1	3	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	1 – Tidak Memadai	2.50		
5.2	Evaluasi Terpisah					3.00	2.00	4.50	3.00	3.13	7.50%	0.23
5.2	1	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	SPIP	-	-	3 – Cukup Memadai	1 – Tidak Memadai	5 – Optimum	3 – Cukup Memadai	3.00		
5.2	2	Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko	SPIP	MRI	-	3 – Cukup Memadai	3 – Cukup Memadai	4 – Memadai	3 – Cukup Memadai	3.25		

Skor Struktur dan Proses

2.6923

PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PEMERINTAH DAERAH XXXXX	
KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN KK LEAD I - PENETAPAN TUJUAN	Indeks KK No. : Disusun oleh/Tanggal : Direviu oleh/Tanggal : Disetujui oleh/Tanggal :

A. Kualitas Sasaran Strategis

No	Uraian	Uraian pengukuran	Bobot	Skor	Skor Akhir
1	Sasaran Strategis Pemda		100		70.00%
a	Sasaran Strategis Tepat	Sasaran Strategis berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis	40	100.00%	40.00%
b	Indikator Kinerja Tepat dan Baik	Indikator kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil	30	0.00%	0.00%
c	Target Kinerja Baik	Target kinerja yang baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target di atasnya	30	100.00%	30.00%
2	Sasaran Strategis Satker		100		75.00%
a	Keterkaitan dengan Sasaran Strategis Pemda	Mengukur cascading kinerja dari sasaran strategis Pemda ke sasaran strategis OPD	30	100%	30.00%
b	Sasaran Strategis Tepat	Sasaran Strategis berorientasi hasil, sesuai dengan isu strategis	30	50%	15.00%
c	Indikator Kinerja Tepat dan Baik	Indikator kinerja jelas, terukur, dan berorientasi hasil	20	100%	20.00%
d	Target Kinerja Baik	Target kinerja yang baik, memperhatikan capaian tahun lalu dan target di atasnya	20	50%	10.00%
	Skor Akhir				72.50%
	Level				C

B. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis

No	Uraian	Uraian pengukuran	Bobot	Skor	Skor Akhir
1	Kualitas Program		100		80.00%
a	Keterkaitan dengan Sasaran Strategis OPD		30	100.00%	30.00%
b	Kualitas sasaran Program OPD		30	100.00%	30.00%
c	Kualitas indikator kinerja program OPD		20	50.00%	10.00%
d	Kualitas target kinerja program OPD		20	50.00%	10.00%
2	Kualitas Kegiatan		100		90.00%
a	Keterkaitan dengan Sasaran Program		40	75.00%	30.00%
b	Kualitas indikator kinerja Kegiatan		30	100.00%	30.00%
c	Kualitas target kinerja kegiatan OPD		30	100.00%	30.00%
	Skor Akhir				85.00%
	Level				B

Gradasi Level

- 1 sampai dengan 60%
- 2 lebih besar dari 60% s.d. 70%
- 3 lebih besar dari 70% s.d. 80%
- 4 lebih besar dari 80% s.d. 90%
- 5 lebih besar dari 90%

**PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH XXXXX**

KERTAS KERJA PENILAIAN PENETAPAN TUJUAN
KK 1.2 - PENILAIAN KUALITAS SASARAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Indeks KK No. :
Disusun oleh/Tanggal :
Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

NO	SASARAN STRATEGIS PEMDA				KUALITAS SASARAN STRATEGIS			SASARAN STRATEGIS OPD SAMPEL					KETERKAITAN SASTRA OPD DENGAN SASTRA PEMDA
	KODE SASARAN	URAIAN SASARAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	SASARAN STRATEGIS TEPAT	IK TEPAT DAN BAIK	TARGET KINERJA BAIK	KODE SASARAN	NAMA OPD	URAIAN SASARAN	URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	
1	SS1	Sastra 1	IK Sastra 1	...	Y	T	Y	SS1.1	Dinas XXX-1	Sastra OPD 1.1	IK Sastra OPD 1.1	...	Y
								SS1.2	Dinas XXX-2	Sastra OPD 1.2	IK Sastra OPD 1.2	...	Y
2	
3	
		<i>Insert row di atas ini</i>											
	Jumlah Y				1	0	1						2
	Jumlah Populasi				1	1	1						2
	Persentase				100.00%	0.00%	100.00%						100.00%

**PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH XXXXX**

**KERTAS KERJA PENILAIAN STRUKTUR DAN PROSES
DINAS XXX**

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			SATKER 1	SATKER 2	SATKER 3	SATKER 4	SATKER 5	SATKER 6	SATKER 7	SATKER 8	SATKER 9	SATKER 10	SATKER 11	NILAI K/L/D	BOBOT SUBUNSUR	NILAI
			SPIP	MRI	IEPK														
1.1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika					3.00											3.00	3.75%	0.11
1.1	1	Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi	SPIP	-	-												3.00		
		Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan keuangan				3.00											3.00		
		Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pengelolaan aset																	
		Organisasi menegakkan integritas dan nilai etika dalam pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan yang berlaku																	
1.1	2	Kebijakan eksplisit atas pengendalian korupsi yang mencakup pernyataan kebijakan, penetapan struktur pengelola risiko korupsi, serta standar perilaku antikorupsi	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.1	3	Organisasi menetapkan dan melaksanakan SOP antikorupsi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons.	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.1	4	Unit kerja sebagai lingkungan belajar dikelola untuk memungkinkan pegawai di semua level berpartisipasi dalam program antikorupsi dengan menghindari perilaku koruptif dan menunjukkan sikap lugas ketika berhadapan dengan situasi yang memicu perilaku korupsi	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.1	5	Integritas organisasional yang tenwujud dalam transparansi dan akuntabilitas telah tercermin dalam visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi/unit kerja	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.1	6	Terdapat persepsi bersama bahwa yang dijadikan acuan utama sebagai perilaku etis adalah peraturan, SOP, hukum, atau standar profesional	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.1	7	Kejadian korupsi/perilaku koruptif telah ditindaklanjuti oleh orang yang kompeten dan independen	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.1	8	Atas hasil audit atau investigasi telah diambil langkah dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh praktik korupsi di dalam organisasi berupa pemastian penerapan sanksi dan perbaikan melalui pemulihan kerugian dan peningkatan pengendalian.	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.2	Komitmen terhadap Kompetensi					3.00											3.00	3.75%	0.11
1.2	1	Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten	SPIP	-	-	3.00											3.00		
1.3	Kepemimpinan yang Kondusif					3.00											3.00	3.75%	0.11
1.3	1	Pimpinan organisasi menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	3.00											3.00		
1.3	2	Pimpinan Instansi Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk penerapan manajemen risiko.	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
1.3	3	Pimpinan Instansi Pemerintah menggunakan informasi terkait risiko dalam pengambilan keputusan	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
1.3	4	Pimpinan Instansi Pemerintah mendorong penerapan manajemen risiko, melalui Penggunaan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
1.3	5	Program antikorupsi didukung dengan penyediaan alokasi sumberdaya secara eksplisit secara memadai, baik anggaran, personil, dan sarana prasarana	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.3	6	Faktor kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pimpinan unit kerja dipakai untuk tujuan mengelola risiko korupsi secara efektif (tidak membiarkan/ mengabaikan)	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.3	7	Pimpinan mendorong bawahan untuk mengikutinya melalui atensi yang diberikan di berbagai kesempatan, keterbukaan dan transparansi, reinforcement, perlakuan adil, dan pengambilan keputusan yang menyertakan pertimbangan etis.	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
1.4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan					3.00											3.00	3.75%	0.11

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			SATKER 1	SATKER 2	SATKER 3	SATKER 4	SATKER 5	SATKER 6	SATKER 7	SATKER 8	SATKER 9	SATKER 10	SATKER 11	NILAI K/L/D	BOBOT SUBUNSUR	NILAI
			SPIP	MRI	IEPK														
1.4	1	Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keandalan laporan keuangan Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian keamanan aset Dalam Struktur organisasi terdapat unit yang melaksanakan fungsi kepatuhan internal.	SPIP	-	-	3.00											3.00		
1.5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat																3.00	3.75%	0.11
1.5	1	Wewenang dan tanggung jawab diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai tingkatannya untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pencapaian tujuan organisasi. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab memperhatikan benturan kepentingan	SPIP	-	-	3.00											3.00		
1.6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM																3.00	3.75%	0.11
1.6	1	Penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan SDM sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi	SPIP	-	-	3.00											3.00		
1.6	2	Pegawai telah mendapatkan fasilitas untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
1.6	3	Pegawai memiliki kesadaran terkait manajemen risiko	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
1.7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif																3.00	3.75%	0.11
1.7	1	Pengawasan APIP telah dapat memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi <i>(diisi dengan nilai Kapabilitas APIP terakhir)</i>	SPIP	-	-	3.00											3.00		
1.8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait																3.00	3.75%	0.11
1.8	1	Pimpinan organisasi menjalin hubungan kerja yang baik (kemitraan) dengan instansi lain terkait dengan upaya pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	3.00											3.00		
1.8	2	Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang baik, instansi Pemerintah telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
2.1	Identifikasi Risiko																3.00	10.00%	0.30
2.1	1	Pemerintah Daerah telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko.	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
2.1	2	Risiko telah teridentifikasi dan dituangkan dalam register risiko	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
2.1	3	Proses manajemen risiko telah melekat pada proses bisnis Instansi Pemerintah	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
2.2	Analisis Risiko																3.00	10.00%	0.30
2.2	1	Seluruh risiko telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadiannya	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
2.2	2	Instansi pemerintah telah menentukan prioritas risiko	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
2.2	3	Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
2.2	4	Tindak pengendalian telah diimplementasikan	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
2.2	5	Tindak pengendalian efektif menurunkan risiko	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
2.2	6	Analisis dan asesmen risiko telah dilakukan dan menghasilkan rancangan tindak pengendalian untuk memitigasi risiko korupsi yang sudah terpetakan	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
3.1	Reviu atas Kinerja																3.00	2.27%	0.07
3.1	1	Pimpinan organisasi membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala untuk mengatasi hambatan kinerja, menetapkan strategi perbaikan, dan menilai kinerja suatu unit sampai dengan periode tertentu dalam rangka mengawal pencapaian tujuan organisasi.	SPIP	-	-	3.00											3.00		
3.2	Pembinaan SDM																3.00	2.27%	0.07
3.2	1	Pembinaan SDM dilakukan sehingga setiap pegawai dapat memberikan manfaat optimal dalam pencapaian tujuan organisasi	SPIP	-	-	3.00											3.00		
3.3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi																3.00	2.27%	0.07
3.3	1	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan sistem informasi dapat menyajikan data yang akurat dan tepat waktu untuk digunakan oleh pengguna.	SPIP	-	-	3.00											3.00		
3.4	Pengendalian Fisik atas Aset																3.00	2.27%	0.07
3.4	1	Pengelolaan BMN/D dilakukan untuk menjamin aset tersedia dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna dalam rangka mendukung kinerja organisasi.	SPIP	-	-	3.00											3.00		
3.5	Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja																3.00	2.27%	0.07
3.5	1	Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi.	SPIP	-	-	3.00											3.00		
3.6	Pemisahan Fungsi																3.00	2.27%	0.07

Kode	No	Uraian Parameter	Kode Parameter			SATKER 1	SATKER 2	SATKER 3	SATKER 4	SATKER 5	SATKER 6	SATKER 7	SATKER 8	SATKER 9	SATKER 10	SATKER 11	NILAI K/L/D	BOBOT SUBUNSUR	NILAI
			SPIP	MRI	IEPK														
3.6	1	Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang	SPIP	-	-	3.00											3.00		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting						3.00											3.00	2.27%	0.07
3.7	1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan	SPIP	-	-	3.00											3.00		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian						3.00											3.00	2.27%	0.07
3.8	1	Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bermilai, dan berguna bagi manajemen	SPIP	-	-	3.00											3.00		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatannya						3.00											3.00	2.27%	0.07
3.9	1	Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatannya	SPIP	-	-	3.00											3.00		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatannya						3.00											3.00	2.27%	0.07
3.10	1	Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi	SPIP	-	-	3.00											3.00		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting						3.00											3.00	2.27%	0.07
3.11	1	Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait	SPIP	-	-	3.00											3.00		
Informasi yang Relevan						3.00											3.00	5.00%	0.15
4.1	1	Tersedianya informasi yang relevan untuk kebutuhan internal dan eksternal.	SPIP	-	-	3.00											3.00		
4.1	2	Pimpinan Instansi Pemerintah membangun sistem pengaduan	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
4.1	3	Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan.	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
4.1	4	Register risiko dan rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan ke pihak terkait	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
4.1	5	Saluran pelaporan internal dikelola secara kredibel dalam menerima pelaporan dan memberikan perlindungan kepada pelapor sehingga kepedulian meningkat dan memberikan efek penggentar yang efektif.	SPIP	-	IEPK	3.00											3.00		
Komunikasi yang Efektif						3.00											3.00	5.00%	0.15
4.2	1	Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal	SPIP	-	-	3.00											3.00		
Pemantauan Berkelanjutan						3.00											3.00	7.50%	0.23
5.1	1	Pimpinan organisasi/penanggungjawab program dan kegiatan/penanggungjawab operasional mengevaluasi secara berkala pengendalian intern yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.	SPIP	-	-	3.00											3.00		
5.1	2	Proses manajemen risiko telah direviu	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
5.1	3	Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		
Evaluasi Terpisah						3.00											3.00	7.50%	0.23
5.2	1	Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi.	SPIP	-	-	3.00											3.00		
5.2	2	Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko	SPIP	MRI	-	3.00											3.00		

Skor Struktur dan Proses

3.0000

**PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH XXXXX**

KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
KK LEAD III - PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP

Indeks KK No. :
Disusun oleh/Tanggal :
Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

No.	Pencapaian Tujuan			Capaian K/L/D
	Indikator	Definisi Indikator	Cara Pengukuran	
A	Efektivitas dan Efisiensi			
1.	Capaian Outcome	Mengukur efektivitas pencapaian tujuan organisasi	Menghitung rata-rata pencapaian indikator kinerja utama dari sasaran strategis K/L/D	4
2.	Capaian Output	Mengukur efisiensi pencapaian tujuan kegiatan	Menghitung rata-rata pencapaian indikator output dari kegiatan satuan kerja	4
B	Keandalan Pelaporan Keuangan			
	Opini atas Laporan Keuangan – BPK RI	Penilaian atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah oleh BPK RI	Dapatkan informasi Opini Laporan Keuangan dalam 5 tahun terakhir, yang terdiri dari: - TMP - TW - WDP - WTP-DPP - WTP	3
C	Pengamanan atas Aset Negara/Daerah			
1.	Keamanan Administrasi	Penilaian kualitas penatausahaan BMN/BMD dalam rangka mengamankan BMN/BMD dari sisi administrasi	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan administrasi aset dalam 5 tahun terakhir	1
2.	Keamanan Hukum	Penilaian atas upaya menjaga/melindungi BMN/ BMD dari persengketaan, gugatan, dan beralihnya kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan hukum aset dalam 5 tahun terakhir	5
3.	Keamanan Fisik	Penilaian atas upaya mengatasi penurunan fungsi, jumlah, serta hilangnya barang	Menghitung persentase BMN/BMD dalam kondisi berfungsi baik dan aman dalam 5 tahun terakhir	2
D	Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
1.	Jumlah Temuan atas Ketidakpatuhan dalam LHP BPK RI	Banyaknya temuan yang dilaporkan dalam LHP BPK RI pada subbab Temuan atas Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.	Menghitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.	4

**PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH XXXXX**

KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPIP
KK 3.2 - PENILAIAN CAPAIAN OUTPUT

Indeks KK No. :
Disusun oleh/Tanggal :
Direviu oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

NAMA SATKER	NO	URAIAN SASARAN PROGRAM	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	CAPAIAN				
					SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE REALISASI	
Satker XXX	1	Program A	Kegiatan A.1	IK Kegiatan A.1.1	Persen	100	70	70.00%	
				IK Kegiatan A.1.2	Juta Rupiah	100	72	72.00%	
				Kegiatan A.2	IK Kegiatan A.2.1	Unit	100	70	70.00%
					IK Kegiatan A.2.2	...	100	70	70.00%
	2	Program B		Kegiatan B.1	IK Kegiatan B.1.1		100	70	70.00%
					IK Kegiatan B.1.2		100	70	70.00%
		<i>Insert row di atas ini</i>							
				Capaian Rata-rata				70.29%	
				GRADE				B	

**PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPII TERINTEGRASI
PEMERINTAH DAERAH XXXXX**

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENCAPAIAN TUJUAN SPII
KK 3.3 - Keandalan Laporan Keuangan, Pengamanan Aset, dan Ketaatan**

Indeks KK No. :
Disusun oleh/Tanggal :
Direvisi oleh/Tanggal :
Disetujui oleh/Tanggal :

RESULTS				KRITERIA SKOR					SIMPULAN SKOR PEMDA
NO	INDIKATOR	DEFINISI INDIKATOR	CARA PENGUKURAN	5	4	3	2	1	
Keandalan Pelaporan Keuangan									
1.	Opini atas Laporan Keuangan – BPK RI	Penilaian atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah oleh BPK RI	Dapatkan informasi Opini Laporan Keuangan dalam 5 tahun terakhir, yang terdiri dari: - TMP - TW - WDP - WTP-DPP - WTP	Wajar Tanpa Pengecualian 5 kali berturut-turut atau lebih dan tidak ada temuan berulang	Wajar Tanpa Pengecualian 3 sampai 4 kali berturut-turut dan tidak ada temuan berulang	Wajar Tanpa Pengecualian 1 sampai 2 kali berturut-turut dan masih ada temuan berulang	Wajar Dengan Pengecualian atau Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (pada capaian terakhir)	Tidak Memberikan Pendapat atau Tidak Wajar (pada capaian terakhir)	3
Pengamanan atas Aset Negara/Daerah									
1.	Keamanan Administrasi	Penilaian kualitas penatausahaan BMN/BMD dalam rangka mengamankan BMN/BMD dari sisi administrasi	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan administrasi aset dalam 5 tahun terakhir	Opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal 5 kali berturut-turut dan tidak terdapat catatan sama sekali terkait aset	Opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal 3 kali berturut-turut dan tidak terdapat catatan sama sekali terkait aset	Opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal 1 kali, dimungkinkan masih terdapat catatan terkait aset	Opini Wajar Dengan Pengecualian dan/atau terdapat catatan terkait aset	Opini Tidak Memberikan Pendapat atau Tidak Wajar dan/atau terdapat catatan terkait aset	1
2.	Keamanan Hukum	Penilaian atas upaya menjaga/melindungi BMN/BMD dari persengketaan, gugatan, dan beralihnya kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah	Mengidentifikasi catatan pada LHP BPK terkait permasalahan hukum aset dalam 5 tahun terakhir	Selama 5 tahun tidak terdapat aset yang bermasalah hukum dalam catatan LHP BPK	Selama 3 tahun tidak terdapat aset yang bermasalah hukum dalam catatan LHP BPK	Selama 2 tahun tidak terdapat aset yang bermasalah hukum dalam catatan LHP BPK	Masih terdapat aset yang bermasalah hukum dalam catatan LHP BPK namun tidak mempengaruhi opini BPK	Masih terdapat aset yang bermasalah hukum dalam catatan LHP BPK yang mempengaruhi opini BPK	5
3.	Keamanan Fisik	Penilaian atas upaya mengatasi penurunan fungsi, jumlah, serta hilangnya barang	Menghitung persentase BMN/BMD dalam kondisi berfungsi baik dan aman dalam 5 tahun terakhir	Selama minimal 5 tahun 100% BMN/BMD berfungsi baik dan aman	Selama 3 tahun 100% BMN/BMD berfungsi baik dan aman	100% BMN/BMD berfungsi baik dan aman	75-99% BMN/D berfungsi baik dan aman	<75% BMN/D berfungsi baik dan aman	2
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan									
1	Jumlah Temuan atas Ketidakpatuhan dalam LHP BPK RI	Banyaknya temuan yang dilaporkan dalam LHP BPK RI pada subbab Temuan atas Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.	Menghitung jumlah butir temuan dalam LHP BPK RI terkait Ketidakpatuhan terhadap Peraturan PerUUan	Dalam 4 tahun berturut-turut jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK tidak lebih dari lima dan tidak memengaruhi opini BPK	Dalam 3 tahun berturut-turut jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK tidak lebih dari lima dan tidak memengaruhi opini BPK	Dalam 2 tahun berturut-turut jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK tidak lebih dari lima dan tidak memengaruhi opini BPK	Dalam tahun anggaran terakhir sebelum penilaian jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK tidak lebih dari lima dan tidak memengaruhi opini BPK	Dalam tahun anggaran terakhir sebelum penilaian jumlah temuan ketidakpatuhan dalam LHP BPK lebih dari lima	4

PENILAIAN BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI KEMENTERIAN / LEMBAGA / DAERAH XXXXX								
VALIDASI NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP								
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Nilai SAKIP	Keputusan Validasi	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	KETERANGAN/ PENJELASAN
PENETAPAN TUJUAN								
Kualitas Sasaran Strategis	5	B	3	50.00%		1.50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5	B	3	50.00%		1.50		
SUB JUMLAH PERENCANAAN				100.00%		3.00		
BOBOT PERENCANAAN					40.00%		1.200	
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Skor SPIP Sebelumnya	Keputusan Validasi	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	KETERANGAN/ PENJELASAN
STRUKTUR DAN PROSES								
Lingkungan Pengendalian								
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3.219		3.000	3.75%		0.11		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	2.250		3.000	3.75%		0.11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	2.652		3.000	3.75%		0.11		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3.000		3.000	3.75%		0.11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	2.000		4.000	3.75%		0.15		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2.000		3.000	3.75%		0.11		
Perwujudan Peran APiP yang Efektif (1.7)	2.000		4.000	3.75%		0.15		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	2.500		3.000	3.75%		0.11		
Penilaian Risiko								
Identifikasi Risiko (2.1)	2.750		3.000	10%		0.30		
Analisis Risiko (2.2)	3.183		3.000	10%		0.30		
Kegiatan Pengendalian								
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	2.000		3.000	2.27%		0.07		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	2.000		3.000	2.27%		0.07		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	2.000		3.000	2.27%		0.07		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	2.250		3.000	2.27%		0.07		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	2.000		3.000	2.27%		0.07		
Pemisahan Fungsi (3.6)	2.000		3.000	2.27%		0.07		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	2.000		3.000	2.27%		0.07		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	2.000		3.000	2.27%		0.07		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatan (3.9)	2.000		3.000	2.27%		0.07		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatan (3.10)	2.000		3.000	2.27%		0.07		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	2.000		3.000	2.27%		0.07		
Informasi dan Komunikasi								
Informasi yang Relevan (4.1)	2.825		3.000	5%		0.15		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	2.000		3.000	5%		0.15		
Pemantauan								
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2.833		3.000	7.50%		0.23		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3.000		3.000	7.50%		0.23		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES						3.075		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES					30.00%		0.923	
Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Nilai SAKIP	Keputusan Validasi	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	KETERANGAN/ PENJELASAN
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP								
Efektivitas dan Efisiensi								
Capaian <i>Outcome</i>	4	B	3	15%		0.45		
Capaian <i>Output</i>	4	B	3	15%		0.45		
Keandalan Laporan Keuangan								
Opini LK	3		3	25%		0.75		
Pengamanan atas Aset								
Keamanan Administrasi	1		1	10%		0.10		
Keamanan Fisik	5		3	5%		0.15		
Keamanan Hukum	2		2	10%		0.20		
Ketaatan pada Peraturan								
Temuan Ketaatan - BPK	4		3	20%		0.60		
SUB JUMLAH HASIL				100.00%		2.70		
BOBOT HASIL					30.00%		0.81	
NILAI BASELINE MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI								2.933

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO HASIL BASELINE SPIP						2.700
AREA / KOMPONEN	Skor	Skor Baseline MRI 2020	Keputusan Validasi	Bobot Unsur	Bobot Komponen	
PERENCANAAN				40.00%	1.200	
KUALITAS PERENCANAAN	3.00		3.00	40.00%	1.200	
KAPABILITAS				30.00%	0.600	
KEPEMIMPINAN	3.13		2.00	5.00%	0.100	
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	3.00		2.00	5.00%	0.100	
SUMBER DAYA MANUSIA	3.13		2.00	5.00%	0.100	
KEMITRAAN	3.00		2.00	2.50%	0.050	
PROSES MANAJEMEN RISIKO	3.03		2.00	12.50%	0.250	
HASIL				30.00%	0.900	
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	3.00		3.00	18.75%	0.563	
OUTCOMES	4.00		3.00	11.25%	0.338	
TOTAL				100.00%	2.700	
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)						2.000
PILAR	SKOR	Keputusan Validasi	BOBOT	NILAI		
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI			48%	0.96		
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	3.00	2.00	9.60%	0.19		
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	3.00	2.00	7.20%	0.14		
DUKUNGAN SUMBER DAYA	3.00	2.00	7.20%	0.14		
POWER (KUASA & WEWEWANG)	3.00	2.00	14.40%	0.29		
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	3.00	2.00	9.60%	0.19		
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN			36%	0.72		
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	3.00	2.00	9.00%	0.18		
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3.00	2.00	3.60%	0.07		
KEPEMIMPINAN ETIS	3.00	2.00	9.00%	0.18		
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	3.00	2.00	7.20%	0.14		
IKLIM ETIS PRINSIP	3.00	2.00	7.20%	0.14		
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI			16%	0.32		
INVESTIGASI	3.00	2.00	8.00%	0.16		
TINDAKAN KOREKTIF	3.00	2.00	8.00%	0.16		
TOTAL			100%	2.000		

FORMAT LAPORAN INDIVIDU



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

.....
.....

Nomor : S- /...../...../2021 Desember 2021
 Lampiran : Tiga berkas
 Hal : Hasil Penilaian *Baseline* Maturitas
 Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada
 Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Yth. Menteri/Kepala/Gubernur/Walikota/Bupati
 di

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Kementerian/Lembaga/Pemerintah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 1/2/3/4/5 (Rintisan/Berkembang/Terdefinisi/Terkelola dan Terukur/Optimum)** dengan nilai **X,XX** dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar X,XX serta skor IEPK sebesar X,XX. Rincian hasil penilaian diuraikan sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Skor
1.	Penetapan Tujuan	40%	XXXX
2.	Struktur dan Proses	30%	XXXX
3.	Pencapaian Tujuan	30%	XXXX
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP		XXXX
	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)		XXXX
	Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)		XXXX

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. *(Uraikan kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus dari K/L/D dan Area of Improvement berdasarkan hasil penilaian penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan)*

2.

3. dst

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, disarankan kepada Menteri/Kepala/Gubernur/Walikota/Bupati/Agar:

1. *(Uraikan saran yang dapat menghilangkan penyebab dari kondisi yang mendapat perhatian khusus sebagaimana diuraikan di atas)*

2.

3. dst

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

.....

.....

NIP

Tembusan Yth.:

.....

HASIL PENILAIAN BASELINE
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2021

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PENETAPAN TUJUAN			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	3	1,5
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	2	1
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN	100.00%		2,5
BOBOT PENETAPAN TUJUAN	40.00%		1
STRUKTUR DAN PROSES			
Lingkungan Pengendalian	30.00%	2,659	0,7978
Penilaian Risiko	20.00%	1,883	0,3767
Kegiatan Pengendalian	25.00%	3,000	0,7500
Informasi dan Komunikasi	10.00%	2,594	0,2594
Pemantauan	15.00%	2,417	0,3626
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES	100.00%		2,5460
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES	30.00%		0,764
PENCAPAIAN TUJUAN			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capaian <i>Outcome</i>	15.00%	3	0,45
Capaian <i>Output</i>	15.00%	3	0,45
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25.00%	3	0,75
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Administrasi	10.00%	3	0,30
Keamanan Fisik	5.00%	2	0,10
Keamanan Hukum	10.00%	2	0,20
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuan Ketaatan – BPK	20.00%	2	0,40
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN	100.00%		2,5
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN	30.00%		0,795
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP			2,559

**HASIL PENILAIAN BASELINE
MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) TAHUN 2021**

AREA/KOMPONEN MRI	Bobot Unsur	Skor	Nilai
PERENCANAAN	40,00%		1
Kualitas Perencanaan	40,00%	2,5	
KAPABILITAS	30,00%		0,58
Kepemimpinan	5,00%	2,00	
Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	2,00	
Sumber Daya Manusia	5,00%	2,00	
Kemitraan	2,50%	1,00	
Proses Manajemen Risiko	12,50%	2,00	
HASIL	30,00%		0,62
Aktivitas Penanganan Risiko	18,75%	1,50	
<i>Outcomes</i>	11,25%	3,00	
NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS			2,19

HASIL PENILAIAN BASELINE
INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK) TAHUN 2021

PILAR IEPK	Bobot Unsur	Skor	Nilai
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		0,72
Kebijakan Antikorupsi	9,60%	2	0,19
Seperangkat Sistem Antikorupsi	7,20%	1	0,07
Dukungan Sumber Daya	7,20%	1	0,07
<i>Power</i> (Kuasa dan Wewenang)	14,40%	2	0,29
Pembelajaran Antikorupsi	9,60%	1	0,10
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		0,68
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%	1	0,09
Saluran Pelaporan Internal	3,60%	1	0,04
Kepemimpinan Etis	9,00%	3	0,27
Integritas Organisasional	7,20%	2	0,14
Iklm Etis Prinsip	7,20%	2	0,14
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,32
Investigasi	8,00%	2	0,16
Tindakan Korektif	8,00%	2	0,16
NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUSPI	100%		1,72

FORMAT LAPORAN KOMPILASI PERWAKILAN BPKP DAN KEDEPUTIAN



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
.....
.....

Nomor : S- /...../...../2021 Desember 2021
 Lampiran : Dua berkas
 Hal : Hasil Penilaian *Baseline* Maturitas
 Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada
 K/L/D di Lingkup Kerja Perwakilan
 BPKP/Kedepatian

Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan hasil penilaian *baseline* maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D di lingkup kerja Perwakilan BPKP/Kedepatian dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pemerintah Daerah	Skor SPIP	Skor MRI	Skor IEPK	Proses Penilaian
1.	Provinsi	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
2.	Kota	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
3.	Kota.....	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
4.	Kabupaten	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
5.	Kabupaten	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
6.	Dst	xxxxx	xxxxx	xxxxx	

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. (Uraikan kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus dari K/L/D dan Area of Improvement berdasarkan hasil penilaian penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan)
2.

3. dst

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, telah disampaikan saran kepada Menteri/Kepala/Gubernur/Walikota/Bupati agar:

1. *(Uraikan saran yang dapat menghilangkan penyebab dari kondisi yang mendapat perhatian khusus sebagaimana diuraikan di atas)*

2.

3. dst

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

.....

.....

NIP

Tembusan Yth.:

.....

